

DAFTAR BACAAN

Buku

Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, 2001.

Dirdjosisworo, Soedjono, *Kontrak Bisnis (Menurut Sistem Civil Law, Common Law, dan Praktek Dagang Internasional)*, Bandung, 2003.

Garner, Bryan A., *Black Law Dictionary*, 8th edition, West, St. Paul, 2004.

Hartanto, Andy, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut "Burgerlijk Wetboek" dan Undang Undang Perkawinan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012.

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Meliala, A. Qirom, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985.

Meliala, Djaja S., *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.

Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Nieuwenhuis, J.H., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Surabaya, 1985.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo, Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1979.

-----, *Hukum Perikatan*, Bina Ilmu, Surabaya, 1978.

Prodjodikoro, Wirdjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2004.

-----, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung, 1992.

Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.

Satrio, J., *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

-----, *Hukum Perjanjian: Perjanjian pada umumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XVI, Intermedia, Jakarta, 1996.

Peraturan Perundang-Undangan

Burgerlijk Wetboek (BW).
(Staatblad Nomor 23 Tahun 1847).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975).

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah.
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007).

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 634/Pdt.G/2014/PN.Sby

INTERNET

Averouss, Fedhly, Edison Simarmata, <http://buser.liputan6.com/read/128120/demi-harta-ayah-membunuh-anak-kandung/>

Kodrati, Finalia, Rizky Sekar Afrisia, <http://life.viva.co.id/news/read/383005-yulia-rahman-demian-rebutan-harta-gono-gini/>

Kurniawan, Wahyu, <http://www.solopos.com/2014/03/26/perceraian-artis-nia-daniati-tetap-tuntut-harta-gono-gini-498872/>

Lestari, Dinax, <https://dinaxlestari.wordpress.com/2014/06/27/hukum-perdata-contoh-kasus-perceraian-farhat-abbas-dan-nia-daniati/>

Redaksi, <http://www.nonstop-online.com/2014/02/keseret-skandal-seks-caleg-artis-disemprit/>